

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Halim, A. Ridwan, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hoft, Ph. Vissert. *Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001.
- Imaningrum Susanti, Diah. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT.Alumni, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sibuea, Hotma P. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Krakatauw Book, 2006.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Bandung Alumni, 1997.

Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.

Witanto, D.Y. dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive dalam Perkaraperkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

JURNAL

Adha, Ikrar Aulia. (2018). "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Rekrutmen Hakim Berdasarkan Pasal 14a Undang-Undang No. 49 Tahun 2009". *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2021). "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum*, Volume 3, Nomor 2.

Ariyanti, Dyah. (2021). "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil." *Ikra-Ith Abdimas*, Volume 4, Nomor 3.

Aziz, Machmud. (2010). "Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5.

Cahya Supena, Cecep. (2022). "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, Nomor 2.

Dwianto, Arditio, and Imam Makhali. (2024). "Analisis Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Terhadap Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1

Hamzah, Alvin. (2023). "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla*, Volume 15, Nomor 2.

Haryani, Riastri. (2017). "Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2.

- Haryanti, Dewi. (2015). "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 2, Nomor 2.
- Husen, Ahmad. (2019). "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 3, Nomor 1.
- Indah, Christina Maya. (2019) "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Nomor 1.
- Khalid, Afif. (2014). "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 11.
- Monica, Tiur Henny. (2024). "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani lebih Dari Tiga Perkara". *Jurnal Hukum Responsif*.
- Monteiro, Josef M (2018). "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6, Nomor 3.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. (2023). "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5.
- Nugroho, Aris Setyo, Danang Catur Wahyu Wijayanto, dan Arie Purnomosidi. (2024). "Menguji Asas Ius Curia Novit, Ruang Lingkup Dan Batasan." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 3, Nomor 6.
- Pratama, Surya Mukti, and Hario Danang Pambudhi. (2021). "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Rahman, Andik Abdul, Muhammad Jamal Amin, and Heryono Susilo Utomo. (2017). "Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019." *E-journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3.
- Riwanto, Agus. (2020). "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi

- Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)". *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Volume 3, Nomor 1.
- Saputra, Dadin Eka. (2015) "Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 13, Nomor 1.
- Sumarno, Sumarno. (2022). "Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara." *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 1.
- Syafarida, Ralang Hartati. (2019). "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)". *Jurnal Hukum Replik*, Volume 7, Nomor 1.
- Syafruddin, Syafruddin, and Siti Hasanah. (2022). "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.", *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Volume 4, Nomor 2.
- Tonidaya, Rahmat Setiawan. (2017). "Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)" *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wicaksono, Dian Agung. (2024). "Peluang Penerapan Purcell Principle sebagai Judicial Restraint Bagi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 2, Nomor 5.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. (2018). "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka" *Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

INTERNET

Suripto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (*Judicial Review*), Selasa, 23 Oktober 2024, <https://www.setneg.go.id/index.php>